

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka disimpulkan partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Keuangan Desa di Desa Dulipali Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores dikategorikan cukup baik. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, dalam menunjukan bahwa partisipasi masyarakat Desa Dulipali berupa memberikan masukan atau ide – ide terhadap RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa cukup baik, faktanya menunjukan tingkat kehadiran masyarakat pada saat musrenbangdesa yang mencapai 54% dan dalam mengikuti musrenbangdesa masyarakat pun menyampaikan ide-ide yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat seperti pembangunan bak penampung air bersih serta pemasangan jaringan perpipaan yang menjangkau setiap rumah, pembuatan pagar sekolah PAUD, pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembangunan poskesdes dan peningkatan kapasitas gapoktan dan poktan.
2. Pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah telah membentuk tim khusus yaitu Tim Pelaksana Kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan berupa pemberian lahan secara cuma-cuma untuk kegiatan pembangunan seperti pembangunan bak penampung air minum dan pembangunan poskedsdes. Sedangkan tenaga

masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan dibayar berdsarakan Hari Orang Kerja (HOK).

3. Penatausahaan, dilakukan oleh bendahara desa. Dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa tidak diinformasikan atau diberikan kepada masyarakat. Bendahara desa hanya mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada Kepala Desa, karena sesuai dengan prosedur bendahara hanya mempertanggungjawabkan keuangan kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa membuat pertanggungjawaban di akhir tahun atau yang disebut dengan LKPJ.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaporan dilakukan 2 kali dalam setahun oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat, sedangkan pertanggungjawaban dilakukan di akhir tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman, namun faktanya yang terjadi di Desa Dulipali sudah 2 tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016 belum dibuatnya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Fakta Ini menunjukkan bahwa praktek penerapan asas transparansi dan akuntabel belum berjalan. Selain itu juga ada temuan lain di lapangan bahwa sudah 5 tahun LKPJ belum dibuat, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara BPD dan Kepala Desa sebagai mitra kerja.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan masyarakat harus lebih meningkatkan partisipasinya dengan mengikuti musdus dan musrenbangdesa dan lebih aktif dalam penyampaian ide-ide.
2. Bagi masyarakat, disarankan lebih aktif dalam menyumbangkan ide dan tenaga
3. Pada tahap penatausahaan, masyarakat diharapkan meminta informasi terkait pengelolaan keuangan desa.
4. Bagi pemerintah desa agar lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan melalui media komunikasi seperti papan pengumuman.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Adisasmita Raharjo, 2006, *Pembangunan Perdesaan Dan Perkotaan*, Yogyakarta;Grha Ilmu.

Erly Subandi, 2008, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat;Jakarta.

Erni Tisnawati Sule, 2009, *Pengantar Manajemen*, Jakarta ; Kencana Perdana Media Group.

Isbandi RugmintoAdi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunikasi:Dari Pemikiran Menuju Pemikiran*. Depok; FISIP UI Press.

KBBI 1982, Jakarta; Balai Pustaka

Krina P, 2003, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta*.

Lexy J Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta ;Penerbit Andi.

Mardiasmo, 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui Akuntansi Sector Public : Suatu Sara Good Governance*.

M Barori, 2015, *Perencanaan Pembangunan Dan Partisipati Masyarakat*.

Muhammad Arif, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelol
aan Kekayaaan Desa*. Pekanbaru; Red Post Press.

Ngusmanto, 2015, *Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan*, PT. Mitra Wacana Media.

Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, 2007, Jakarta; Cv Citra Utama.

Sanapiah Faisal, 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*.

Santosa ,2009, *Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung; Revika Aditama.

Santoso Satroepoetr, 1982, *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta; Gramedia.

Siti Irene Astuti 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*.Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Sjamsulbachri, 2004, *Karakteristik Perencanaan Strategi*, Bandung;Kencana Utama.

Sugiyah, 2010, *Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Di Sekolah Dasar Negeri Iv Wates,Kabupaten Kulon Progo*, Tesis; PPs UNY.

Sujarweni Wiratna V, 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta; Pustaka Baru Press

Sumardi, 2010, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kasus Desa Sakarini Jawa Tengah Dalam Patra Widya*, Yogyakarta; Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata.

B. Internet

<http://seknafitra.pengertianatakelolakeuangan.blogspot.com>

C. Perundang-Undangan

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa